

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pertanian memiliki arti penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat luas. Dalam program percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia yang tertuang dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), pertanian menjadi salah satu program utama. Pembangunan disektor pertanian pada tahap tertentu akan membuat pengembangan agribisnis yang cukup besar. Salah satu subsektor pertanian yang berperan besar adalah perkebunan. Perkebunan menjadi andalan bagi perekonomian nasional dan salah satu penyumbang terbesar devisa negara Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Dapat dilihat dari nilai ekspor komoditas perkebunan pada Tahun 2020 secara total nilai ekspor perkebunan mencapai US\$ 28,24 milyar atau setara dengan Rp. 410,76 triliun (asumsi 1 US\$= Rp 14.582). Sedangkan berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB), subsektor perkebunan Tahun 2020 tumbuh 1,33 persen (Y-on-Y) (Ditjenbun, 2022).

Kontribusi nasional sub sektor perkebunan terhadap perekonomian nasional semakin meningkat dan diharapkan dapat memperkuat pembangunan perkebunan secara menyeluruh. Untuk sektor perkebunan, salah satu pengembangan kegiatan ekonomi utamanya adalah kelapa sawit. Kelapa sawit (*Elaeis guineensis*) merupakan salah satu komoditas utama tanaman perkebunan yang penting dalam perekonomian Indonesia sebagai penghasil devisa negara (Ambiyah, 2012).

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perkebunan (2022) perusahaan

perkebunan kelapa sawit di Indonesia dibedakan menjadi tiga, yakni perkebunan besar swasta (PBS), perkebunan rakyat (PR), dan perkebunan besar negara (PBN). Indonesia telah menjadi negara utama produsen minyak kelapa sawit dunia dengan total produksi 36 juta ton metrik atau 61 persen minyak kelapa sawit dunia (Index Mundi, 2016). Pernyataan tersebut didukung dan selaras dengan data empiris luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang menunjukkan tren meningkat. Luas area perkebunan kelapa sawit di Indonesia selama 10 tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan, yaitu 9,10 juta ha pada tahun 2011 menjadi 14,66 juta ha pada tahun 2021 (BPS, 2022). Peningkatan luas lahan diikuti dengan peningkatan produksi kelapa sawit sebesar 31,73 juta ton pada tahun 2016 dan meningkat menjadi 46,22 juta ton pada tahun 2021 (BPS, 2022). Dilihat dari sisi ketenagakerjaan, industri kelapa sawit mampu menyerap 16,2 juta tenaga kerja dengan rincian 4,2 juta tenaga kerja langsung dan 12 juta tenaga kerja tidak langsung.

Peningkatan perkebunan kelapa sawit memberikan dampak ekonomi, social, lingkungan, dan pengembangan industri CPO. Menurut Susila (2004) kontribusi industri berbasis kelapa sawit mempunyai dampak penting dalam pembangunan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan perbaikan distribusi pendapatan. Pengembangan kelapa sawit berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan oleh pertumbuhan investasi, output, dan devisa. Industri berbasis kelapa sawit juga mempunyai kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan rumah tangga yang berasal dari usaha kelapa sawit (Susila, 2004).

Pertumbuhan perkebunan kelapa sawit juga berpotensi besar menimbulkan

persoalan lingkungan selain memperoleh keuntungan ekonomi (Yusop et al. 2008; Boer et al. 2012). Keberadaan perkebunan kelapa sawit dapat mengakibatkan deforestasi hutan, meningkatnya emisi karbon, dan perubahan iklim, sehingga dapat mengganggu kondisi lingkungan (Pacheco, 2012). Menurut penelitian Boer et al. (2012), Provinsi Kalimantan Tengah mengalami deforestasi hutan, ini diakibatkan target untuk meningkatkan luasan perkebunan kelapa sawit hingga 3,5 juta ha dari yang luasan yang dimiliki saat itu sebesar 1 juta ha. Boer et al. (2012) mengemukakan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi deforestasi hutan, yaitu dengan cara “*land swap*” atau pertukaran lahan dari hutan menjadi non hutan dan peningkatan produktivitas kelapa sawit oleh petani mandiri (swadaya).

Sentra produksi kelapa sawit berdasarkan pengembangan kegiatan ekonomi utama berada di daerah Sumatera dan Kalimantan. Salah satu daerah yang memiliki potensi perkebunan kelapa sawit yang cukup besar. adalah Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Berdasarkan data dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, luas perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami peningkatan dari 191.366 ha pada tahun 2015 menjadi 231.958 ha pada tahun 2020. Kecamatan Muara Kaman merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang melakukan ekspansi kebun kelapa sawit. Ekspansi tersebut mengakibatkan petani mengganti sebagian atau seluruh komoditas kopi menjadi kelapa sawit di kebunnya. Alasan petani mengganti komoditas menjadi kebun kelapa sawit karena mereka menganggap berkebun kelapa sawit relatif lebih mudah dan praktis dibandingkan berkebun kopi dan diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar. Alasan lain juga

karena petani di Kalimantan Timur mengikuti tren pasar, pemerintah, dan pengusaha focus pada tanaman kelapa sawit yang saat ini dominan di tanam di Kalimantan Timur (<https://disbun.kaltimprov.go.id>).

Sebagian besar lahan usaha perkebunan kelapa sawit ini dikelola oleh perusahaan swasta. Terdapat 68 perusahaan perkebunan besar swasta yang membudidayakan tanaman kelapa sawit di Kabupaten Kutai Kartanegara (Dinas Perkebunan, 2022). Pengolahan minyak sawit mentah (*Crude Palm Oil*) saat ini menjadi suatu bentuk investasi yang banyak terlihat khususnya di zona hulu sungai Mahakam. Pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS) ini tidak terlepas dari keberadaan luas lahan yang telah produktif. Di sisi lain, aktivitas industri tersebut menimbulkan eksternalitas terhadap masyarakat yang berada di kawasan industri.

Eksternalitas yang timbul adalah limbah cair dari aktivitas industri pengolahan CPO. Eksternalitas yang ditimbulkan dari aktivitas industri seringkali diabaikan dan tidak diperhitungkan dalam komponen biaya suatu kegiatan (Goldman 1977; Hufschmids 1992; Prasetya et al. 2016). Untuk mengurangi kerugian yang dialami masyarakat eksternalitas yang timbul harus dapat diinternalisasikan. Industri pengolahan CPO telah melakukan internalisasi dalam bentuk pembuatan kolam penampung air limbah atau biasa disebut instalasi pengolahan air limbah (IPAL), namun seiring berjalannya waktu kondisi IPAL saat ini tidak mampu menampung limbah cair dari aktivitas industri sehingga apabila intensitas hujan tinggi dan volume produksi TBS sedang meningkat, limbah cair tersebut meluap dan terbang kemana-mana sehingga kembali menimbulkan eksternalitas. Hal ini merupakan

sebagian dampak negative dari keberadaan perkebunan kelapa sawit di lingkungan masyarakat yang kurang direncanakan secara cermat.

Berdasarkan latar belakang yang di paparkan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "Dampak Keberadaan Perkebunan Kelapa Sawit Pada Pembangunan Di Hulu Sungai Mahakam Kabupaten Kutai Kartanegara".

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kontribusi perkebunan kelapa sawit terhadap pembangunan fasilitas umum di hulu sungai Mahakam Kabupaten Kutai Kartanegara?
2. Bagaimana dampak ekonomi masyarakat berhubungan dengan keberadaan perkebunan kelapa sawit di hulu sungai Mahakam Kabupaten Kutai Kartanegara?
3. Bagaimana dampak lingkungan masyarakat berhubungan dengan keberadaan perkebunan kelapa sawit di hulu sungai Mahakam Kabupaten Kutai Kartanegara?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan kontribusi perkebunan kelapa sawit terhadap pembangunan fasilitas umum di hulu sungai Mahakam Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Untuk mengetahui dampak ekonomi masyarakat berhubungan dengan keberadaan perkebunan kelapa sawit di hulu sungai Mahakam Kabupaten Kutai Kartanegara.

3. Untuk mengetahui dampak lingkungan masyarakat berhubungan dengan keberadaan perkebunan kelapa sawit di hulu sungai Mahakam Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan tujuan tersebut diharapkan hasil kajian ini akan memberikan manfaat:

1. Memberikan informasi kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai pengambil kebijakan dalam proses pendirian pabrik pengolahan kelapa sawit di daerahnya.
2. Memberikan informasi kepada masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara tentang dampak dari keberadaan perkebunan kelapa sawit.
3. Memberikan informasi kepada pengusaha perkebunan kelapa sawit tentang dampak yang ditimbulkan dan usaha penanggulangannya sebagai wujud dari pengembangan masyarakat di lingkungannya.